

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Aziz Minta JIEP dan MRT Serap 10.000 Tenaga Kerja

Palmerah, Warta Kota

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta meminta dua perseroan daerah, yakni PT JIEP dan PT MRT Jakarta yang mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) agar memberikan dampak manfaat pada perekonomian warga.

Salah satunya berdampak pada penyerapan tenaga kerja.

Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan, hal ini perlu dipertimbangkan mengingat angka pengangguran di Jakarta cukup besar.

Aziz telah menyampaikan hal ini usai menerima saran dan masukan dari Komisi B (bidang perekonomian) dan Komisi C (bidang keuangan) dalam rapat dengan pendapat (RDP) yang digelar beberapa waktu lalu.

"Selama ini DKI Jakarta sedang mengalami masalah besar di bidang ketenagakerjaan. Tingkat penganggurannya sangat tinggi. Kami berharap dengan tiga Perda ini bisa menyerap tenaga kerja sehingga bisa menurunkan tingkat pengangguran,"

kata Aziz pada Senin (25/11/2024).

Aziz mengatakan, tiga Raperda yang tengah dibahas ini adalah Raperda tentang Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroan Daerah); Raperda tentang Penyertaan Modal Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroan Daerah); dan Raperda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Mass Rapid Transit.

Dia berharap, perubahan payung hukum ini bisa menyerap hingga 10.000 tenaga kerja warga Jakarta.

"Targetnya 10.000 tenaga kerja, 5.000 dari MRT dan 5.000 dari JIEP. Kami berharap digunakan tenaga kerja setempat agar bisa mendapatkan prioritas," tutur Abdul Aziz.

Apalagi, Kawasan JIEP ingin mengembangkan wilayahnya dengan berbagai macam fasilitas. M

Mulai dari layanan kesehatan, layanan pendidikan, hingga tempat pengelolaan sampah yang pastinya membutuhkan tenaga kerja.

"Kami sudah survei, kawasan JIEP di kelilingi

daerah kumuh, perlu bantuan. Dengan Perda maka Pemda akan memiliki saham 53 persen dan bisa mengalihkan CSR untuk warga sekitar," ungkap Aziz.

Sedangkan Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh berharap, kedua BUMD membuat kajian yang lengkap terkait cakupan dan sektor bisnis yang akan dijalankan.

Kata dia pengembangan bisnis usaha cukup baik, namun perlu ditinjau lagi cakupan bisnisnya agar bisa mengikuti alur usaha di metropolitan.

"Jangan sampai kita sudah membuat suatu rangkaian bisnis yang besar dan tujuan kita bagus, tetapi tidak tercapai," pesan Nova.

Siapkan SDM

Sementara itu Anggota Komisi C Lukmanul Hakim menyarankan Pemprov DKI mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk bisa mengisi tenaga kerja di kedua BUMD tersebut.

"SMK di Jakarta banyak sekali. Bagaimana berbagi pengetahuan (transfer knowledge) dengan anak-

anak didik kita. Jangan nanti gerbong rusak kita hire (merekrut-Red) orang luar. Ini penting karena longtime," ucap Lukman.

Direktur Utama PT JIEP Satrio Witjaksono menyatakan, dengan kenaikan saham milik Pemprov dari 50 persen menjadi 53 persen, maka warga Jakarta bisa menjadi prioritas untuk mendapat manfaat.

"Tentunya setelah jadi BUMD kepentingan provinsi bisa lebih difokuskan. Sehingga penyaluran CSR, penyerapan tenaga kerja dan melibatkan lingkungan bisa lebih banyak," ungkap Satrio.

Sedangkan Direktur Utama PT MRT Jakarta Tuhiyat menyatakan, siap membuka peluang perekrutan tenaga kerja besar-besaran, serta efisiensi waktu bagi perjalanan masyarakat yang menggunakan transportasi massal.

"Hasil riset UI, ada 10,1 juta tenaga kerja yang bisa terserap. Kemudian juga efek kesehatan karena adanya efek penurunan emisi karbon," kata Tuhiyat. (faf)